



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/2736810

☐ Pembetulan Ke ☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP	:	340914324433000	A.5 NAMA JABATAN	:	Pelaksana
A.2 NIP/ NRP	:	197704162008121004	A.6 JENIS KELAMIN	:	☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN
A.3 NAMA	:	Tarsim	A.7 NIK	:	3215141605770002
A.4 PANGKAT/ GOL	:	III/a / Penata Muda	A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K / 2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	46.430.800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4.643.080
3.	TUNJANGAN ANAK	1.857.232
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2.570.900
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	49.075.392
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	108.632.924
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	5.431.646
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.158.211
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	7.589.857
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	101.043.067
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	101.043.067
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	33.543.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.677.150
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	1.677.150
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	1.677.150
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1.677.150
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	000148965017000
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi	:	451005
D.4 Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN	:	Denny Hariman Ritonga, S.Sos
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ ◆

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	BPE-60584/CT/KPP.2204/2026
Tanggal	04 Maret 2026
NPWP	3215141605770002
Nama Wajib Pajak	TARSIM
Jenis SPT	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	2025
Masa Pajak	Januari - Desember 2025
Status SPT	Normal
Saluran	Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	04 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.